**KARENA KORONA, SEJUMLAH RENCANA PEMBANGUNAN MATARAM “AMBYAR”**



<https://www.publikreport.com/>

MATARAM-Pandemi Korona membuat rencana pembangunan di Kota Mataram kacau balau. “Beberapa program akhirnya tidak bisa terealisasi. Tidak jadi dilaksanakan, padahal penting juga untuk masyarakat,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, Selasa (31/3).

Seluruh proyek terpaksa dibatalkan. Termasuk proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 40 miliar. Yang rencananya digunakan untuk jalan, irigasi, hingga mempermak wajah pantai di Loang Baloq.

Beberapa proyek yang menggunakan DAK semula sudah masuk proses tender. Namun terpaksa dibatalkan. Eko berharap DAK yang tak jadi turun hanya bersifat penundaan. Sehingga ketika kondisi virus Korona menghilang, DAK bisa diturunkan kembali seperti rencana semula.

”Sangat terasa mengganggu program kita. Tapi kita sadari kondisi ini dirasakan secara nasional juga,” ujarnya.

Dengan penundaan ini, pemkot tak ada rencana untuk menggunakan dana APBD. Sebagai substitusi pendanaan setelah DAK ditunda.

Eko mengatakan, upaya tersebut tidak mungkin dilakukan. Sekarang ini pemkot tengah melakukan rasionalisasi anggaran. Untuk kebutuhan penanganan dan pencegahan virus korona.

Rasionalisasi dilakukan sebab biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan virus Korona hanya sebesar Rp 4 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk persoalan tersebut mencapai Rp 45 miliar.

”Rasionalisasinya menyuluruh. Misalnya dimbil dari perjalanan dinas selama tiga bulan ke depan. Kemudian kebutuhan ATK,” tutur Sekda.

Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura mengatakan, DAK yang ditunda hanya untuk kegiatan fisik. Sementara DAK di Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan tetap digelontorkan.

”Total DAK itu sekitar Rp 40 miliar. Tapi yang tidak diutak-atik itu di Dikes dan Disdik,” kata Mahmuddin.

Proses tender juga dihentikan untuk proyek menggunakan APBD Kota Mataram. Tahun ini, ada 37 proyek senilai sekitar Rp 59 miliar. Hingga Maret ini ada lima paket proyek yang masuk laman LPSE milik Pemkot Mataram.

Empat proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Peningkatan jalan di Banda Seraya/Wirasenggala dan Komplek Ahmad Yani. Masing-masing proyek senilai Rp 7,8 miliar dan Rp 2 miliar.

Kemudian ada supervisi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dengan nilai proyek Rp 155 juta. Serta pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan paket satu senilai Rp 2,3 miliar. Satu proyek lainnya milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram. Yakni pengadaan truk dobel kabin dan kelengkapannya. Proyek ini dilelang dengan harga Rp 1,7 miliar.

”Seluruhnya dibatalkan itu, berdasarkan surat dari Kemenkeu. Kalau ada yang sudah kontrak sebenarnya bisa berlanjut, tapi ini kan masih lelang, belum ada kontrak,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi mengaku pasrah dengan kebijakan penyetopan proyek DAK. Karena ini merupakan keputusan pemerintah pusat. Tahun ini kata dia, Dispar sendiri mendapat DAK untuk penataan TLB sebesar Rp 3,4 miliar. Namun berhubung ada Korona maka dibatalkan. “Tak hanya di Dispar, di instansi lain juga, kan?” ujar dia.

Dengan kondisi ini, maka ia meyakini DAK untuk penataan TLB akan dialokasikan kembali tahun depan. Jika Agustus ini digelontorkan, maka proyek yang akan dikerjakan tidak akan mencapai target. “Tidak bisa capai target kalau tahun ini dikerjakan,” tutur mantan Sekdis BKD ini. (dit/jay/r3)

**Sumber berita**:

# [*https://lombokpost.jawapos.com/*](https://lombokpost.jawapos.com/)*,* Karena Korona, Sejumlah Rencana Pembangunan Mataram “Ambyar”, 1 April 2020;

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakanurusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga)jenis, meliputi:
4. DAK Fisik Reguler terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, yang meliputi:
5. Pendidikan meliputi:
* Pendidikan Anak Usia Dini;
* Sekolah Dasar;
* Sekolah Menengah Pertama;
* Sanggar Kegiatan Belajar;
* Sekolah Menengah Atas;
* Sekolah Luar Biasa;
* Sekolah Menengah Kejuruan;
* Gedung Olahraga; dan
* Perpustakaan Daerah.
1. kesehatan dan keluarga berencana, meliputi:
* Pelayanan Dasar;
* Pelayanan Rujukan;
* Pelayanan Kefarmasian;
* Penguatan Puskesmas daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
* Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas;
* Penurunan Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi;
* Penguatan Intervensi Stunting;
* Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
* Penguatan rumah sakit rujukan nasional/ provinsi/ regional pariwisata;
* Pembangunan rumah sakit pratama;
* PuskesmasPariwisata;
* Balai Pelatihan Kesehatan;
* Keluarga Berencana; dan
* Penurunan Sfunting (keluarga berencana).
1. perumahan dan permukiman;
2. industri kecil dan menengah;
3. pertanian;
4. kelautan dan perikanan;
5. pariwisata;
6. jalan terdiri dari bidang:
* Jalan;
* Keselamatan Jalan.
1. air minum; sanitasi;
2. irigasi;
3. pasar;
4. lingkungan hidup dan kehutanan;
5. transportasi perdesaan, terdiri dari subbidang:
* Lingkungan Hidup; dan
* Kehutanan.
1. transportasi laut; dan
2. sosial.
3. DAK Fisik Penugasan; dan
4. DAK Fisik Afirmasi.

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi